

**TESIS**

**ASAS PROPORSIONALITAS DALAM  
PERJANJIAN KERJA BAGI PEKERJA  
PEREMPUAN**



Diajukan oleh

**TEGUH SISWOYO**

**NIM 2120215310027**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Juli 2023**

**ASAS PROPORSIONALITAS DALAM  
PERJANJIAN KERJA BAGI PEKERJA  
PEREMPUAN**

**TESIS**

Program Magister Hukum

Diajukan oleh

**TEGUH SISWOYO**

**NIM 2120215310027**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Juli 2023**

**TESIS INI  
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI  
PADA TANGGAL**

**PEMBIMBING UTAMA**



**Dr. SUPRAPTO, S.H., M.H.  
NIP. 198105172005011001**

**PEMBIMBING PENDAMPING**



**Dr. SAPRUDIN, S.H., LL.M.  
NIP. 198206102005011002**

**DISAHKAN OLEH  
KOORDINATOR PROGRAM STUDI  
PROGRAM MAGISTER HUKUM**



**Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Teguh Siswoyo  
NIM : 2120215310027  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Teguh Siswoyo  
2120215310027

**SISWOYO, TEGUH. 2023. ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN KERJA BAGI PEKERJA PEREMPUAN. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. Suprpto, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Dr. Saprudin, S.H., LL.M. 102 Halaman.**

## **RINGKASAN**

Setiap perempuan mempunyai hak-hak khusus yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Hak Perempuan dimana perempuan dikategorikan dalam kelompok rentan yang mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Asas yang mendasari hak bagi perempuan diantaranya hak perspektif gender dan anti diskriminasi dalam artian memiliki hak yang seperti kaum laki-laki dalam bidang pendidikan, hukum, pekerjaan, politik, kewarganegaraan dan hak dalam perkawinan sertakewajibannya. Pekerja perempuan adalah perempuan dewasa yang berumur diatas

18 (delapan belas) tahun baik sudah menikah ataupun belum, mereka yang melakukan pekerjaan dengan mendapat gaji maupun imbalan dalam bentuk lain. Hak dalam hukum ketenagakerjaan memiliki keterkaitan dengan perundang-undangan bagi perempuan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi, upah, jabatan, yang mana realitanya hak pekerja perempuan tersebut sering didiskriminasi dengan pekerja pria. Perkembangannya di dunia bisnis, di dalam pembuatan perjanjian kerja dibuat secara baku karena alasan efisiensi waktu. Kontrak baku pada dasarnya merupakan kontrak yang sudah dibuat secara baku karena adanya *bargainig position* yang biasanya adalah Kreditur, dalam hal perjanjian kerja yakni pengusaha. Dalam mengadakan kontrak perlu memperhatikan keadilan selain hanya mengenai kepastian hukum. Keadilan dalam berkontrak lebih difokuskan pada adanya perbedaan kepentingan yang dimiliki para pihak tetapi dari perbedaan tersebut dimasukkan dalam klausul secara proporsionalitas. Sehingga masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah *reform-oriented research* yaitu penelitian yang secara intensif mengevaluasi pemenuhan ketentuan yang sedang berlaku dan merekomendasikan perubahan terhadap peraturan manapun yang dibutuhkan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai bahan hukum primer adalah terkait adalah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Penelitian yang bersifat preskriptif analitis mengandung hal-hal yang terkait dengan apa yang seyogyanya dilakukan bukan membuktikan kebenaran hipotesis.

Pengaturan mengenai perjanjian kerja bagi pekerja perempuan di Indonesia diatur secara umum diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam ketentuan Bab IX diatur mengenai hubungan kerja, yang mengatur mengenai syarat sah perjanjian kerja serta jenis perjanjian kerja bagi pekerja/buruh. Bentuk perjanjian kerja bagi pekerja perempuan

berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Syarat-syarat sahnya perjanjian kerja bagi pekerja perempuan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menentukan perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dalam perjanjian kerja berdasarkan asas proporsionalitas, bahwasanya salah satu instrumen dalam penyusunan perjanjian dan mempertegas bahwa proporsionalitas menekankan persamaan proses dan kedudukan antara pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum terutama dalam penentuan dan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (pemberi kerja dan pekerja). Keberlakuan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan perjanjian kerja harus selaras dengan asas itikad baik yang harus dilaksanakan secara ekstensif atau diperluas tidak hanya sekadar pada tahap perumusan perjanjian kerja, namun juga pada tataran pelaksanaan dari perjanjian kerja tersebut. Asas proporsional atau keseimbangan juga mencakup tahapan pra- kontrak, pembentukan kontrak, serta pelaksanaan kontrak. Hal ini menegaskan bahwa selain sebagai panduan, asas proporsionalitas juga berfungsi sebagai batu uji dalam melakukan upaya hukum atas pelanggaran yang dilakukan salahsatu pihak dalam tahap pra-kontrak, pembentukan kontrak, serta pelaksanaan kontrak.

**SISWOYO, TEGUH. 2023. ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN KERJA BAGI PEKERJA PEREMPUAN. Program Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama : Dr. Suprpto, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Dr. Saprudin, S.H., LL.M. 102 Halaman.**

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci: Asas Proporsioalitas, Perjanjian Kerja, Pekerja Perempuan**

Tujuan penelitian tesis yang berjudul “Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kerja Bagi Pekerja Perempuan” adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan mengenai perjanjian kerja bagi pekerja perempuan di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis tentang bentuk perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dalam perjanjian kerja berdasarkan asas proporsionalitas. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, pengaturan mengenai perjanjian kerja bagi pekerja perempuan di Indonesia diatur secara umum diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam ketentuan Bab IX diatur mengenai hubungan kerja, yang mengatur mengenai syarat sah perjanjian kerja serta jenis perjanjian kerja bagi pekerja/buruh. Kedua, perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dalam perjanjian kerja berdasarkan asas proporsionalitas, bahwasanya salah satu instrument dalam penyusunan perjanjian dan mempertegas bahwa proporsionalitas menekankan persamaan proses dan kedudukan antara pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum terutama dalam penentuan dan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (pemberi kerja dan pekerja). Keberlakuan asas proporsionalitas dalam pelaksanaan perjanjian kerja harus selaras dengan asas itikad baik yang harus dilaksanakan secara ekstensif atau diperluas tidak hanya sekedar pada tahap perumusan perjanjian kerja, namun juga pada tataran pelaksanaan dari perjanjian kerja tersebut. Asas proporsional atau keseimbangan juga mencakup tahapan pra- kontrak, pembentukan kontrak, serta pelaksanaan kontrak. Hal ini menegaskan bahwa selain sebagai panduan, asas proporsionalitas juga berfungsi sebagai batu uji dalam melakukan upaya hukum atas pelanggaran yang dilakukan salahsatu pihak dalam tahap pra-kontrak, pembentukan kontrak, serta pelaksanaan kontrak.

**SISWOYO, TEGUH. 2023. PROPORTIONALIZE PRINCIPLE IN EMPLOYMENT AGREEMENTS FOR WOMEN WORKERS.** *Master of Law Program, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: Dr. Suprpto, S.H., M.H., and Advisor II: Dr. Saprudin, S.H., LL.M. 102 Pages.*

**Keywords: Proportionalize Principle, Employment Agreements, Women Workers**

*The purpose of the thesis research entitled "Principle of Proportionality in Work Agreements for Women Workers" is to find out and analyze the arrangements regarding work agreements for women workers in Indonesia and to know and analyze the forms of legal protection for women workers in work agreements based on the principle of proportionality. The type of research used is normative legal research, namely research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal materials related to the issues to be discussed.*

*The research results obtained are First, arrangements regarding work agreements for women workers in Indonesia are generally regulated based on the provisions of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The provisions of Chapter IX stipulate employment relations, which regulate the legal requirements for work agreements and types of work agreements for workers/labourers. Second, legal protection for women workers in work agreements is based on the principle of proportionality, that is one of the instruments in the preparation of agreements and emphasizes that proportionality emphasizes equality of process and position between parties who enter into legal relations, especially in determining and implementing rights and obligations for both parties (employers and workers). The application of the principle of proportionality in the implementation of work agreements must be in line with the principle of good faith which must be implemented extensively or expanded not only at the stage of formulating work agreements, but also at the level of implementation of said work agreements. The principle of proportion or balance also includes the pre-contract stage, contract formation, and contract execution. This confirms that apart from being a guide, the principle of proportionality also functions as a touchstone in carrying out legal remedies for violations committed by one of the parties during the pre-contract, contract formation, and contract execution stages.*



## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur, hormat serta kemuliaan hanya bagi Allah Yang Maha Kuasa atas segala kasih, rahmat, karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul **ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN KERJA BAGI PEKERJA PEREMPUAN.**

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Magister Hukum, Program Pasca Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat.

Di dalam penyelesaian tesis ini penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan Tesis ini. Dalam kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian studi penulis, yaitu kepada:

1. Yang Sangat Terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang Terpelajar Bapak Dr. H. Ahmad Syaufi, SH., M.H. selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang Terpelajar Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Pembimbing Ketua dan Yang Terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H. LL.M., selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan masukan-masukan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf pada Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas ilmu yang diberikan sehingga

penulis mendapatkan pengetahuan yang lebih serta memberikan pelayanan yang baik hingga penulis pada akhirnya dapat menyelesaikan studi;

5. Rekan-rekan satu angkatan 2021, atas kebersamaan dan keceriaan yang akan selalu dikenang dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dari tesis ini. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Akhir kata, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca terutama bagi yang ingin melanjutkan maupun mengembangkan tesis ini.

Hormat Penulis

Teguh Siswoyo

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN .....	i
HALAMAN JUDUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN TESIS ..	iv
RINGKASAN .....	v
ABSTRAK .....	vii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian .....	24
G. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB II PENGATURAN MENGENAI PERJANJIAN KERJA BAGI PEKERJA PEREMPUAN DI INDONESIA ....</b>	<b>30</b>
A. Pengaturan Pekerja Perempuan di Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	30
B. Bentuk Perjanjian Kerja Bagi Pekerja Perempuan di Indonesia .....	38
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PEREMPUAN DALAM PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN ASAS PROPORSIONALITAS .....</b>	<b>58</b>
A. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Kerja Bagi Pekerja Perempuan.....	58
B. Asas Proporsionalitas di Dalam Perjanjian Kerja Bagi Pekerja Perempuan.....	90

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	102

**DAFTAR PUSTAKA**  
**RIWAYAT HIDUP**